

Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i4.5022>

Berita Polemik 4 Pulau Aceh dalam Bingkai Media *Online* Republika.co.id dan Mediaindonesia.com

Rachmi Kurnia Siregar ^{1*}, Rafli Akram Kurniansyah ², Hanif Fadhlurahman ³

^{1*} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

² Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Srivijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

article info

Article history:

Received 20 May 2025

Received in revised form

20 June 2025

Accepted 1 July 2025

Available online October 2025.

Keywords:

Framing Analysis; Polemic of 4

Aceh Islands; Online Media;

Republika.co.id;

Mediaindonesia.com.

Kata Kunci:

Analisis Framing; Polemik 4

Pulau Aceh; Media Online;

Republika.co.id;

Mediaindonesia.com.


abstract

The emergence of the decree of the Ministry of Home Affairs reviewing 4 Aceh Islands namely Panjang Island, Lipan Island, Mangkir Gadang Island, and Mangkir Ketek Island which will be transferred to the territory of North Sumatra Province (Sumut) sparked public reaction. This government decision brought a new polemic between Aceh Province led by Governor Muzakir Manaf (Muallem) and North Sumatra Governor Bobby Nasution. The two provinces are in tension regarding who has the right to ownership of the 4 islands. This polemic has attracted attention in the mass media, especially for online media including Republika.co.id and Mediaindonesia.com. The news analyzed was in the edition of June 13 - June 17, 2025. This study uses a qualitative approach using Robert N Entman's framing analysis model in dissecting the research. Researchers selected 4 news stories in each media as research objects. The results of the study show that there are differences in news framing between Republika.co.id and Mediaindonesia.com. Republika.co.id, in its reporting, tends to side with the Acehnese people as the aggrieved party by presenting information regarding the demands of students and religious leaders. Meanwhile, Mediaindonesia.com tends to side with the central government as the authority in resolving the Aceh 4 Islands controversy. This tendency is evident in Mediaindonesia.com's selection of sources, which cite statements from Coordinating Minister Yusril, Deputy Minister of Home Affairs Bima Arya, Chairman of Commission II of the Indonesian House of Representatives, and President Prabowo as a representative of the central government.

abstrak

Munculnya surat keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji 4 Pulau Aceh yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek yang akan dipindahkan ke wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menuai reaksi publik. Keputusan pemerintah ini membawa sebuah polemic baru antara Provinsi Aceh dipimpin Gubernur Muzakir Manaf (Muallem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Kedua provinsi bersitegang terkait dengan siapa yang berhak atas kepemilikan 4 pulau tersebut. Adanya polemic ini, mendapatkan perhatian di media massa khususnya bagi media online di antaranya Republika.co.id dan Mediaindonesia.com. Berita yang dianalisis pada edisi 13 Juni - 17 Juni 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis framing Robert N Entman dalam membedah penelitian. Peneliti memilih masing-masing 4 berita di setiap media sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan bingkai berita antara Republika.co.id dan Mediaindonesia.com. Republika.co.id dalam pemberitaannya cenderung berpihak kepada masyarakat Aceh selaku pihak yang dirugikan dengan menyajikan informasi mengenai tuntutan para mahasiswa dan kelompok ulama. Sementara itu, Mediaindonesia.com condong berada dalam sisi pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang dalam menyelesaikan polemic 4 Pulau Aceh. Kecenderungan pemberitaan ini, terlihat dari pemilihan sumber informasi yang dilakukan oleh Mediaindonesia.com dengan mengutip pernyataan dari Menko Yusril, Wamendagri Bima Arya, Ketua Komisi II DPR RI hingga Presiden Prabowo sebagai representasi dari pemerintah pusat.

Corresponding Author. Email: rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id ^{1}.

Copyright 2025 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 



ACM Computing Classification System (CCS)

EBSCOhost

Communication and Mass Media Complete (CMMC)

1. Pendahuluan

Media massa memegang peran sentral dalam membentuk persepsi publik serta memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa (*event*) (Sari *et al.*, 2025). Selain berfungsi sebagai penyebar komunikasi dan informasi kepada khalayak luas (Paradita *et al.*, 2024), media juga menjalankan proses seleksi informasi, penataan narasi, hingga penonjolan aspek tertentu yang akhirnya membingkai realitas menjadi kumpulan informasi (Siagian & Ritonga, 2024). Setiap informasi yang diteruskan ke publik memiliki standar kelayakan yang memengaruhi respons masyarakat (Iskandar *et al.*, 2022). Dalam proses ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga turut membentuk persepsi publik (Pratiwi *et al.*, 2025). Media memiliki kebijakan dalam membingkai (*framing*) informasi, membuka peluang munculnya polemik yang kemudian diangkat menjadi pemberitaan (Azani *et al.*, 2023). Media juga dapat berperan sebagai *agent of change* dalam membangun realitas sosial ketika narasi tertentu berkembang di tengah masyarakat dan menjadi konsumsi informasi (Mawaaddah, 2025). Dalam diskursus pemberitaan di Indonesia, penggunaan bingkai media atau *media framing* menjadi pendekatan relevan untuk kajian isu-isu dengan tingkat sensitivitas tinggi atau berpotensi menimbulkan kegentingan.

Salah satu isu hangat saat ini adalah polemik empat pulau di Provinsi Aceh yang mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai tata letak wilayah administrasi kepulauan, khususnya di Aceh (Saubani, 2025). SK tersebut muncul akibat perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait validitas dan keabsahan beberapa nama pulau di wilayah Aceh. Ketidaksesuaian data ini memicu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk menjelaskan latar belakang terbitnya SK tersebut yang bertujuan mengesahkan status kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh yang kini sedang disengketakan. Pulau-pulau yang kini berada di tengah konflik tersebut meliputi Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Panjang (CNN Indonesia, 2025). Revisi SK oleh Mendagri Tito merujuk pada SK Kemendagri Nomor 111 Tahun 1992 yang memuat nota kesepahaman antara Gubernur Aceh dan Gubernur

Sumatera Utara mengenai batas wilayah kedua provinsi. Berdasarkan data dari SK tersebut serta hasil kajian Kemendagri pada 2022, Mendagri Tito mengesahkan keempat pulau itu sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (*Sumut*). Pengesahan ini dituangkan dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi kepulauan beserta struktur pemerintahan yang disahkan pada 25 April 2025 (Setuningsih, 2025). Di tengah proses pengesahan empat pulau sebagai wilayah Sumut oleh pemerintah pusat (*central government*), muncul gelombang protes dari masyarakat Aceh yang telah melayangkan demonstrasi menolak keputusan tersebut (Ulya & Carina, 2025). Ekspresi kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat dipandang sebagai bentuk pengabaian atas sejarah otonomi daerah yang telah diatur dalam berbagai keputusan dan perjanjian (Tempo.co, 2025). Masyarakat Aceh menegaskan secara *de facto* maupun *de jure* bahwa keempat pulau tersebut sepenuhnya milik Aceh (Sanny, 2025). Pulau-pulau ini telah menjadi bagian integral dari sejarah Aceh yang tidak bisa diubah begitu saja oleh pemerintah pusat. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga menyentuh identitas lokal, sejarah, dan kebudayaan Aceh.

Keempat pulau yang diperjuangkan rakyat Aceh menjadi simbol budaya yang mencerminkan keterikatan emosional masyarakat terhadap para pejuang masa lalu (Wijoyo *et al.*, 2024). Sengketa pulau ini dianggap sebagai bentuk pengabaian identitas lokal dan menimbulkan luka kolektif karena wilayah Aceh Singkil diambil alih (Fajriansyah, 2025). Situasi ini menimbulkan kegentingan yang tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah, tetapi juga meluas ke masyarakat, terutama terkait narasi provinsi mana yang dianggap sebagai pemilik sah keempat pulau tersebut. Dalam polemik tersebut, media berperan penting sebagai mediator antara realitas peristiwa dan persepsi publik. Melalui *framing*, media memiliki otoritas dalam menentukan aspek yang ingin ditekankan sehingga memengaruhi diskursus masyarakat secara luas. Pengaruh suatu peristiwa dapat menjadi indikator bagi media dalam menentukan *agenda setting* pemberitaan polemik ini (Kurniansyah *et al.*, 2024). Hal ini sangat memengaruhi cara publik memaknai polemik empat

pulau Aceh melalui informasi yang dikemas oleh berbagai media massa, khususnya media *online*. Perbedaan sudut pandang antar media membuat polemik ini mendapat tanggapan masif dari masyarakat. Dua media *online*, yakni *Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com*, menjadi objek kajian penelitian. Kedua media tersebut memiliki nilai historis yang, jika dikaitkan dengan persoalan Aceh, memunculkan narasi berkelanjutan untuk diteliti. *Republika.co.id* dikenal sebagai media *online* yang mengedepankan pemberitaan untuk kepentingan umat Islam (Hasan *et al.*, 2022), sedangkan *Mediaindonesia.com* dikenal sebagai media independen, lugas, dan berpengaruh, sehingga keduanya memiliki karakteristik tersendiri dalam penyajian berita. Unsur narasi yang dibingkai oleh kedua media *online* ini juga tidak terlepas dari pengaruh redaksi maupun pemilik media yang menentukan arah pemberitaan. *Republika.co.id* dengan konsistensi pada pemberitaan yang mengutamakan kepentingan umat Islam, tidak terlepas dari pola yang dibentuk komunitas muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki misi menyuarakan nilai-nilai keislaman (Tabroni *et al.*, 2023). Sementara itu, *Mediaindonesia.com* merupakan anak perusahaan dari *Media Grup* (Putri *et al.*, 2023).

Media ini memiliki visi sebagai surat kabar independen dan inovatif, serta tidak terlepas dari eksistensi pemiliknya, Surya Dharma Paloh, seorang konglomerat media asal Aceh yang juga menjabat Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (*Nasdem*) (Dahlia & Permana, 2022). Nilai historis kedua media tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji sejauh mana polemik empat pulau Aceh dibingkai oleh *Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com* yang sarat dengan latar belakang keislaman dan sejarah Aceh. Melalui pendekatan analisis *framing*, rumusan masalah yang diangkat adalah: “Bagaimana media *online Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com* membingkai isu polemik empat Pulau Aceh?” Penelitian Wibowo & Triyono (2024) mengenai pemberitaan relokasi Pulau Rempang yang dibingkai oleh media *online Kompas.com* dan *Detik.com* menunjukkan adanya penekanan pesan berbeda dalam beberapa bingkai informasi, menghasilkan makna yang tidak seragam antara kedua media tersebut. Nabila & An’amta (2024) meneliti konflik Pulau Rempang yang dibingkai oleh dua media lokal Batam, yaitu *Batamtimes.co* dan *Batamnnews.co*, dan menemukan bahwa keduanya

selaras dalam menonjolkan keberpihakan pada pemerintah selaku pemangku kebijakan atas relokasi warga demi kelancaran proyek *Rempang Eco City* yang menjadi sumber investasi baru. Selanjutnya, penelitian Triamanda *et al.* (2023) tentang pembingkai berita pemindahan IKN di media *online CNN Indonesia* menemukan bahwa media tersebut belum pernah mengangkat sisi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan IKN. Hingga saat ini, kajian perbandingan dua media *online* dalam membingkai informasi terkait polemik empat Pulau Aceh belum ditemukan. Kesenjangan tersebut mendorong peneliti untuk menelaah pemberitaan polemik empat pulau Aceh yang dibingkai oleh *Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com*.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengupas permasalahan secara mendalam melalui penggunaan narasi, struktur kalimat, serta analisis wacana (Kriyantono, 2022). Peneliti membedah pemberitaan polemik empat Pulau Aceh yang dibingkai oleh media *online Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com* dengan metodologi *kualitatif*. Fokus utama penelitian ini adalah analisis *framing* terhadap pemberitaan kedua media tersebut terkait polemik empat Pulau Aceh. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, serta telaah literatur sebagai *tools* utama dalam proses riset. Seluruh data dikaji secara sistematis untuk memperoleh gambaran utuh tentang konstruksi realitas yang dibangun oleh masing-masing media.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis *framing* menurut Robert N. Entman yang mencakup empat elemen: penjelasan persoalan, identifikasi penyebab masalah, pembuatan keputusan moral, serta penekanan pada solusi penyelesaian. Analisis ini diperkuat dengan dua dimensi besar *framing*, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu (Eriyanto, 2018). Subjek penelitian terdiri atas dua media *online*, yakni *Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com*. Objek penelitian difokuskan pada pengamatan serta analisis terhadap berita-berita terkait polemik empat Pulau Aceh yang diterbitkan oleh kedua media dalam periode 13–17 Juni 2025. Pemilihan empat berita pada rentang waktu tersebut

didasarkan pada intensitas pembahasan isu polemik empat Pulau Aceh yang sedang memuncak di media massa, menyusul keputusan pemerintah pusat (*central government*) yang menetapkan keempat pulau di

wilayah Kabupaten Aceh Singkil masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara (*Sumut*).

Tabel 1. Berita Republika.co.id

No.	Judul Berita	Tanggal Berita	Tayang Berita
1.	JK: Empat Pulau Aceh Bagian Perjanjian dengan GAM	Jumat, 13 Juni 2025	18:23 WIB
2.	Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Pengalihan 4 Pulau Aceh ke Sumut	Jumat, 13 Juni 2025	21:00 WIB
3.	DPR Desak Mendagri Tuntaskan Polemik Aceh-Sumut Soal Empat Pulau	Minggu, 15 Juni 2025	06:46 WIB
4.	Santri Aceh Barat: Tak Sejengkal Pun Tanah Aceh Akan Kami Lepas	Selasa, 17 Juni 2025	08:37 WIB

Tabel 2. Berita Mediaindonesia.com

No.	Judul Berita	Tanggal Berita	Tayang Berita
1.	Kemendagri: Keputusan Presiden Prabowo Penting untuk Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut	Minggu, 15 Juni 2025	17:31 WIB
2.	Perjanjian Helsinki dan UU 24/56 Tak Bisa Dijadikan Dasar Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut	Minggu, 15 Juni 2025	18:24 WIB
3.	Ajak Publik Bersabar, Yusril Tegaskan 4 Pulau Belum Diputuskan	Minggu, 15 Juni 2025	21:56 WIB
4.	Pemerintah Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, DPR: Jaga Keutuhan NKRI	Selasa, 17 Juni 2025	16:58 WIB

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Empat Elemen *Framing* Robert N Entman

Analisis framing menurut Robert N. Entman memberikan pemahaman mengenai bagaimana media dan jurnalis mengemas realitas peristiwa, lalu membangun konstruksi makna sesuai sudut pandang tertentu (Eriyanto, 2018). Model ini terdiri dari empat elemen utama. Pertama, definisi masalah (*problem definition*), yaitu penentuan konteks serta makna inti dari suatu peristiwa oleh media. Kedua, diagnosa

penyebab (*causal interpretation*), di mana media mengidentifikasi faktor atau aktor yang dianggap sebagai sumber permasalahan atau konflik. Ketiga, keputusan moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian etis yang diberikan terhadap suatu tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Keempat, rekomendasi penanganan (*treatment recommendation*), yakni solusi atau jalan keluar yang ditawarkan media untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keempat elemen ini saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir dalam membingkai isu, sehingga memengaruhi cara publik memahami dan merespons suatu peristiwa.

Tabel 3. Bingkai Berita Pertama di Republika.co.id

Judul : JK: Empat Pulau Aceh Bagian Perjanjian dengan GAM

Penjabaran Permasalahan	Sengketa wilayah perbatasan di antara dua Provinsi yakni Aceh dan Sumut terkait dengan keputusan 4 Pulau yakni (Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang) imbas keputusan pemerintah yakni Kemendagri.
Menentukan Awal Mula Penyebab	Adanya keputusan sepihak yang dilakukan oleh Kemendagri terkait dengan wilayah 4 Pulau tersebut menuai reaksi publik.

Masalah	
Membuat Keputusan Moral	Jusuf Kalla menganggap SK Kemendagri tersebut tidaklah arif dilakukan karena berdampak pada psikologis yang tinggi terutama bagi masyarakat Aceh.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Jusuf Kalla meminta supaya PP lantas membereskan permasalahan ini dengan cepat dan melakukan dialog dengan berbagai pihak, tak lupa juga harus berdasarkan pada catatan sejarah misal perjanjian Helsinki dengan maksud masyarakat Aceh dapat tetap percaya pada pemerintah.

Tabel 4. Bingkai Berita Kedua di Republika.co.id

Judul : Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Pengalihan 4 Pulau Aceh ke Sumut

Penjabaran Permasalahan	Adanya penolakan dari kalangan mahasiswa yang terhimpun dalam persatuan mahasiswa Aceh Jakarta Raya terhadap keputusan Mendagri tentang pemindahan 4 Pulau Aceh ke Sumut.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Imbas dikeluarkannya SK Kemendagri, membuat kurang transparansi kebijakan publik dan dialog yang dilakukan oleh PP.
Membuat Keputusan Moral	SK Kemendagri dianggap tidak bernuansa adil terhadap masyarakat Aceh karena hanya sebuah keputusan sepihak belaka.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Para mahasiswa berdemonstrasi untuk menyuarakan suara masyarakat Aceh yang menuntut agar SK Kemendagri dibatalkan dan dihapuskan.

Tabel 5. Bingkai Berita Ketiga di Republika.co.id

Judul : DPR Desak Mendagri Tuntaskan Polemik Aceh-Sumut Soal Empat Pulau

Penjabaran Permasalahan	Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami menyoroti polemik sengketa kepemilikan administrasi 4 pulau yang berdampak pada konflik antar wilayah Aceh dan Sumut.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Ketidakakuratan penetapan batas-batas wilayah administratif yang dilakukan oleh Tim Rupa Bumi tahun 2008 – 2009 dalam kajian terhadap sengketa 4 pulau tersebut.
Membuat Keputusan Moral	Rifqinizami meminta agar Mendagri melakukan langkah strategis dengan berpedoman independen dan adil serta tidak berpihak pada satu sisi.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Rifqinizami menyebut DPR akan melaksanakan <i>controlling</i> secara berkelanjutan agar kemudian sebuah solusi atas permasalahan ini dapat terselesaikan.

Tabel 6. Bingkai Berita Keempat di Republika.co.id

Judul : Santri Aceh Barat: Tak Sejengkal Pun Tanah Aceh Akan Kami Lepas

Penjabaran Permasalahan	Pemindahan wilayah administratif keempat pulau dari Aceh ke Sumut menciderai kedaulatan Aceh dan harga diri rakyat Aceh.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Teungku Bachtiar menyebut Kepmendagri No 300.2.2-2138 tahun 2025 abai terhadap sejarah historis dan cenderung menimbulkan konflik kembali di Aceh yang saat ini sudah damai.
Membuat Keputusan Moral	Adanya Kepmendagri dapat memengaruhi pola pemahaman masyarakat Aceh serta memperkeruh suasana Aceh menjadi penuh gejolak.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Teungku Bachtiar menyerukan agar pemerintah pusat berlaku bijaksana dan segera mengembalikan keempat pulau itu dalam naungan Provinsi Aceh.

Tabel 7. Bingkai Berita Pertama di Mediaindonesia.com

Judul : Kemendagri: Keputusan Presiden Prabowo Penting untuk Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Penjabaran Permasalahan	Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco menjabarkan polemik kepemilikan 4 Pulau tersebut dijabarkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Presiden Prabowo.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Konflik ini muncul imbas adanya perbedaan batas-batas wilayah administratif pemerintahan di antara Aceh dan Sumut.
Membuat Keputusan Moral	Kebijakan Presiden dalam mengambil alih konflik tersebut dinilai sebagai langkah terbaik dalam penyelesaian masalah ini.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Wamendagri Bima Arya menyebut Mendagri Tito akan mengadakan diskusi antara pejabat gubernur, bupati dan DPRD Provinsi Aceh dan Sumut untuk solusi penyelesaiannya.

Tabel 8. Bingkai Berita Kedua di Mediaindonesia.com

Judul : Kemendagri: Perjanjian Helsinki dan UU 24/56 Tak Bisa Dijadikan Dasar Soal Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

Penjabaran Permasalahan	Menko Yusril menerangkan perjanjian Helsinki dan UU 24/56 tidak kuat dijadikan bukti sebagai rujukan dalam menentukan pemegang hak keempat wilayah pulau tersebut.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Ketidakjelasan aturan tegas yang menjelaskan perbatasan wilayah administratif keempat pulau sengketa itu.
Membuat Keputusan Moral	Yusril berpendapat rujukan dokumen lampau tidak bisa dijadikan dasar aturan dan harus ada keterangan hukum secara jelas.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Perlu dilakukan kajian hukum yang komprehensif dan kajian secara tersistematis agar permasalahan ini dapat diketemukan sebuah solusi.

Tabel 9. Bingkai Berita Ketiga di Mediaindonesia.com

Judul : Ajak Publik Bersabar, Yusril Tegaskan 4 Pulau Belum Diputuskan

Penjabaran Permasalahan	Yusril menegaskan PP sedang mencari solusi terbaik agar permasalahan keempat pulau yang sedang disengketakan selesai.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Permasalahan sengketa batas wilayah yang terjadi di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan wilayah administratif pemerintahan.
Membuat Keputusan Moral	Kemendagri mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan permasalahan ini atas timbulnya SK Kepmendagri yang bernuansa konflik.
Menekankan Jalan Keluar Penyelesaian Permasalahan	Yusril meminta agar semua pihak dengan bersabar hati menunggu keputusan resmi pemerintah yang sedang melakukan dialog dengan tokoh masyarakat di antara kedua provinsi tersebut.

Tabel 10. Bingkai Berita Keempat di Mediaindonesia.com

Judul : Pemerintah Putuskan 4 Pulau Milik Aceh, DPR: Jaga Keutuhan NKRI

Penjabaran Permasalahan	Presiden Prabowo mengambil keputusan 4 pulau sengketa tersebut kembali milik Provinsi Aceh.
Menentukan Awal Mula Penyebab Masalah	Ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait sengketa pulau memancing langkah strategis Presiden Prabowo.
Membuat Keputusan Moral	Presiden Prabowo dinilai mendengar masukan publik secara baik dengan mempertimbangkan banyak aspek sehingga dapat mengambil keputusan

secara adil.

Menekankan Jalan Keluar
Penyelesaian Permasalahan

Keputusan Presiden Prabowo dalam mengembalikan 4 pulau ke wilayah Provinsi Aceh sebagai bagian dalam menjaga keutuhan NKRI serta memelihara integrasi nusantara.

Dua Dimensi Besar Framing Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek Tertentu di Republika.co.id

Dalam berita pertama yang dirilis oleh Republika.co.id, media tersebut menyoroti isu polemik sengketa 4 pulau Aceh dengan menulis tanggapan dari mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, yang menerangkan bahwa empat pulau Aceh yang saat ini sedang disengketakan oleh Pemerintah Pusat (PP) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan bukti historis berdasarkan adanya perjanjian Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). JK juga mendesak agar PP tidak gencar memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam Provinsi Sumatera Utara (Sumut) karena akan berdampak pada isu perpecahan yang mungkin akan timbul di Aceh. Menurut JK, permasalahan sengketa ini sudah jelas diselesaikan berdasarkan adanya perjanjian Helsinki yang saat itu dirinya sebagai negosiator pemerintah Indonesia. Polemik sengketa pulau ini lebih jelas ditonjolkan oleh Republika.co.id dengan mengutip komentar JK yang menyuarakan dan berada dalam sisi masyarakat Aceh yang tidak terima jika empat pulau tersebut dipindahkan oleh PP karena ini sudah menyangkut harga diri dan martabat masyarakat Aceh.

"Jadi bagi Aceh, itu harga diri. Karena diambil, dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat."

Kemudian masuk ke berita kedua Republika.co.id dengan menilik protes demonstrasi yang disuarakan oleh masyarakat Aceh, terutama dari kalangan Persatuan Mahasiswa Aceh Jakarta Raya, yang menolak SK Kepmendagri itu diputuskan. Pada berita ini, Republika.co.id kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat Aceh dengan memberikan informasi yang khusus menginformasikan suara demonstrasi perwakilan rakyat Aceh yang berada di Jakarta. Tuntutan dari mahasiswa ini bermaksud agar Mendagri mencabut SK yang dinilai membuat marah masyarakat Aceh dan menimbulkan ketegangan kembali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan SK Kemendagri."

Berlanjut pada berita ketiga, Republika.co.id membahas tanggapan dari Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami yang meminta agar PP melalui Mendagri segera menyelesaikan sengketa 4 pulau ini dengan tuntas tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Di sini, Republika.co.id menekankan bahwa kepemilikan asli 4 pulau tersebut sangat berarti bagi pembangunan daerah ke depan serta status kependudukan penduduk yang berwilayah di daerah tersebut. Republika.co.id juga menekankan masukan rencana kebijakan DPR RI dalam mengatasi polemik ini dengan turut mengawal proses dialog antar kelembagaan agar tercapainya ruang diskusi dan sampai di titik penyelesaian solusi masalah.

"Kami akan terus melakukan fungsi pengawasan yang kuat dan efektif kepada Kemendagri sebagai mitra kami."

Selanjutnya di berita keempat, Republika.co.id mengangkat isu para santri dan ulama yang melakukan protes atas kebijakan PP, terutama Kemendagri, yang ingin memindahkan wilayah administrasi 4 Pulau Aceh ke Provinsi Sumut. Dalam pemberitaan ini, Republika.co.id mengamati tindakan penyampaian ekspresi yang dilakukan oleh santri dan ulama bertempat di Meulaboh, Aceh Barat. Mereka tidak akan melepas tanah asli 4 pulau tersebut untuk diserahkan kepada wilayah lain karena sejatinya tanah wilayah itu merupakan hasil dari perjuangan masyarakat Aceh dan sebagai bentuk harga diri bangsa Aceh. Republika.co.id memasukkan tanggapan dari Teungku Bachtiar yang berperan sebagai koordinator aksi merangkap sebagai kader DPRK. Hal yang ditonjolkan dalam Republika.co.id pada sesi berita ini adalah masyarakat Aceh tidak rela pulau yang berada di wilayahnya direbut oleh pemerintah dan diserahkan ke provinsi lain secara sepihak karena itu sama saja dengan mencoreng martabat besar rakyat Aceh.

"Jangan memancing suasana dengan menggrogoti bumi Aceh, karena PP dan GAM sudah berdamai sejak lama.

Seleksi Isu dan Penonjolan Aspek Tertentu di Mediaindonesia.com

Di berita pertama yang dipublikasikan oleh Mediaindonesia.com, menelaah komentar dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan Presiden Prabowo akan segera mengambil alih polemik 4 Pulau Aceh ini sesegera mungkin sebelum konflik ini berlanjut. Hal yang ditekankan oleh Mediaindonesia.com dalam edisi berita ini yaitu memberitakan informasi dari sisi pemerintah selaku pemangku kebijakan yang diharapkan dapat membawa sebuah solusi berarti untuk masyarakat. Di satu sisi, Mediaindonesia.com juga mengutip pernyataan dari Wamendagri Bima Arya yang turut menjelaskan bahwa ke depannya Mendagri Tito akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama para pemangku kebijakan di daerah. Di sini, Mediaindonesia.com menekankan pemerintah hadir dalam permasalahan ini dengan melakukan komunikasi dua arah kepada gubernur, bupati, dan DPRD di Provinsi Aceh dan Sumut untuk sama-sama menemukan jalan keluar dari konflik yang tak berkesudahan ini.

“Selasa rapat di Kemendagri bersama jajaran tim Rupabumi beserta instansi terkait.”

Selanjutnya di berita kedua yang dirilis oleh Mediaindonesia.com, menyoroti sisi tanggapan pemerintah terhadap polemik 4 pulau Aceh ini melalui pernyataan dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa adanya sejarah historis perjanjian Helsinki tidak kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa pulau ini. Yusril menjelaskan dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara rinci status kepemilikan dari 4 pulau Aceh melainkan hanya sebagai pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh. Mediaindonesia.com pada edisi berita ini kembali menegaskan pernyataan dari Yusril yang tidak setuju akan status kepemilikan pulau yang disengketakan tersebut dengan berpedoman pada asas UU.

“Tidak bisa dijadikan rujukan, kami telah mempelajari akan hal itu.”

Pada berita ketiga, Mediaindonesia.com kembali menelusuri pernyataan dari Menko Yusril yang meminta agar masyarakat bersabar akan polemik 4 Pulau Aceh ini. Menurut Yusril, saat ini pemerintah

melalui Kemendagri sedang mencari jalan keluar penyelesaian polemik ini dengan melakukan dialog dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait. Pesan yang ditekankan Mediaindonesia.com dalam edisi berita ini yaitu pemerintah hadir sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pulau sengketa tersebut, dengan melakukan musyawarah dan mengajak beragam tokoh untuk duduk bersama dalam menemukan solusi permasalahan. Memang tidak mudah untuk mencapai sebuah kesepakatan, maka dari itu pemerintah ingin semua belah pihak bersikap teduh dan tenang supaya tidak timbul narasi-narasi yang menggiring opini ke arah perpecahan.

“Saya juga dalam waktu dekat akan berdiskusi bersama Gubernur Aceh Mualem dan Gubernur Sumut Bobby.”

Kemudian di berita keempat yang ditulis oleh Mediaindonesia.com membahas sisi pernyataan dari pemerintah, khususnya Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami, yang mengapresiasi langkah kebijakan Presiden Prabowo yang mengambil alih polemik ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo adalah dengan mengembalikan 4 pulau yang sedang disengketakan tersebut kepada bangsa Aceh. Artinya, dapat ditekankan Prabowo dengan sepenuhnya menyerahkan kembali pulau tersebut sebagai tanah asli wilayah Provinsi Aceh. Mediaindonesia.com dalam sesi berita ini menonjolkan peranan pemerintah pusat melalui keputusan final Presiden Prabowo yang dinilai sebagai jalan terakhir penyelesaian polemik sengketa perebutan wilayah tanah ini.

“Dan yang paling utama dokumen yang menyatakan Provinsi Aceh menegaskan 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah pemerintahannya.”

Langkah yang diambil Prabowo juga bermaksud supaya nilai dan pertahanan NKRI dapat selalu terjaga, mengingat adanya konflik sengketa tanah ini dapat memicu konflik lampau di tanah Aceh antara Pemerintah Indonesia dan GAM kembali muncul. Kemudian terdapat kalimat yang ditonjolkan oleh Mediaindonesia.com dalam membahas berita ini, yaitu Presiden Prabowo menjunjung tinggi geografis wilayah Aceh dan mengusahakan agar seluruh dokumen yang merujuk pada catatan historis dapat dipastikan sumber validitas dan keabsahan datanya.

Pembahasan

Pembingkai isu sengketa empat pulau Aceh oleh media daring memperlihatkan dinamika yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi kepentingan, ideologi, serta orientasi redaksi masing-masing media (Eriyanto, 2018; Hasan *et al.*, 2022). *Republika.co.id*, misalnya, cenderung menyoroti aspek historis, identitas, dan perasaan dirugikan masyarakat Aceh akibat keputusan pemerintah pusat, sebagaimana juga terjadi pada framing pemberitaan isu keislaman yang kerap diangkat media tersebut (Tabroni *et al.*, 2023). Narasi yang dibangun sering kali menampilkan suara mahasiswa, ulama, dan tokoh lokal Aceh, serta menekankan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan administratif, sebagaimana diulas oleh Fajriansyah (2025) dan Sanny (2025). Sikap ini sejalan dengan temuan Azani *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa framing media sangat dipengaruhi oleh kedekatan isu dengan identitas atau basis pembaca. Sebaliknya, *MediaIndonesia.com* lebih menonjolkan narasi yang bersumber dari pemerintah pusat, menampilkan pernyataan pejabat seperti Menko Yusril, Wamendagri Bima Arya, dan Presiden Prabowo, serta menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur hukum dan mekanisme formal (Setuningsih, 2025; Saubani, 2025).

Pola pemberitaan ini merefleksikan kecenderungan media nasional dalam menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintah, sebagaimana diidentifikasi oleh Dahlia dan Permana (2022) bahwa oligarki media kerap memengaruhi arah pemberitaan sesuai kepentingan pemilik dan jejaring politiknya. Dalam kasus polemik empat pulau, *MediaIndonesia.com* mengedepankan narasi rasional dan birokratis, sejalan dengan temuan Wibowo dan Triyono (2024) yang menyoroti peran media nasional dalam membingkai isu-isu strategis secara lebih “dingin” dan legalistik. Perbedaan pola framing antara kedua media tersebut berdampak pada persepsi publik. *Republika.co.id* berperan membangkitkan solidaritas dan sentimen kedaerahan masyarakat Aceh, bahkan membangun resistensi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap mengabaikan sejarah dan identitas lokal (Fajriansyah, 2025; Ulya & Carina, 2025). Sementara itu, *MediaIndonesia.com* justru menampilkan pemerintah pusat sebagai aktor rasional yang berupaya menjaga keutuhan NKRI dan

mencari solusi terbaik melalui koordinasi lintas lembaga (CNN Indonesia, 2025; Wijoyo *et al.*, 2024). Fenomena ini sejalan dengan pendapat Sari *et al.* (2025) bahwa media massa memiliki kekuatan membentuk opini publik, baik melalui seleksi isu maupun penonjolan aspek tertentu. *Framing* media bukan hanya membentuk persepsi, tetapi juga dapat memicu aksi kolektif. Ketika narasi kehilangan tanah leluhur terus diangkat, tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan menjadi semakin besar (Tempo.co, 2025). Namun, narasi tentang supremasi hukum dan keutuhan negara yang didorong media nasional dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meski berisiko mengabaikan aspirasi lokal (Pratiwi *et al.*, 2025). Dalam konteks polemik empat pulau Aceh, situasi ini mencerminkan apa yang dikemukakan Iskandar *et al.* (2022) bahwa media tidak lagi sekadar saluran informasi, melainkan aktor yang berperan dalam konstruksi realitas sosial dan politik. Secara metodologis, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan Kriyantono (2022), yakni pentingnya memahami narasi, struktur kalimat, dan penonjolan wacana dalam membedah framing media.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh Mawaaddah (2025) dan Nabila & An'anta (2024), yang menegaskan bahwa framing sangat dipengaruhi oleh kepentingan redaksi, kedekatan isu dengan audiens, serta tekanan politik dan ekonomi di balik ruang redaksi. Dalam kasus sengketa empat pulau Aceh, kedua media tidak hanya berbeda dalam memilih sumber dan narasi, tetapi juga dalam menentukan titik tekan pemberitaan, baik pada aspek emosi kolektif maupun pada legitimasi kebijakan negara. Akhirnya, perbedaan framing yang dilakukan kedua media menjadi contoh nyata bagaimana media di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh orientasi politik, identitas, dan kepentingan ekonomi pemiliknya (Dahlia & Permana, 2022; Putri *et al.*, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya literasi media di masyarakat agar publik mampu menilai setiap pemberitaan secara kritis dan tidak mudah terjebak dalam polarisasi. Sebagaimana dikemukakan Kurniansyah *et al.* (2024), keberpihakan media dalam membingkai isu-isu strategis memang tidak terelakkan, namun peran media sebagai pilar demokrasi tetap menuntut objektivitas dan tanggung jawab sosial dalam setiap narasi yang dibangun.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti melalui kajian terhadap bingkai media online *Republika.co.id* dan *Mediaindonesia.com* dalam memberitakan polemik empat pulau Aceh, terdapat beberapa perbedaan dalam cara kedua media tersebut membingkai informasi. *Republika.co.id* dalam pemberitaannya cenderung berpihak kepada masyarakat Aceh sebagai pihak yang dirugikan atas sengketa pulau ini, dengan mengutamakan suara dan tuntutan masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari informasi mengenai tuntutan para mahasiswa yang menyerukan agar SK Kepmendagri dibatalkan, demonstrasi para santri dan ulama yang menuntut pemerintah pusat membatalkan SK tersebut, hingga reaksi dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang mendesak pemerintah agar tidak memindahkan wilayah pulau tersebut karena dikhawatirkan akan memicu konflik lama muncul kembali. Meskipun demikian, terdapat pula berita yang memuat komentar dari pihak pemerintah, khususnya dari kalangan DPR RI, yang menyerukan agar konflik sengketa tanah ini segera diselesaikan. Sementara itu, pemberitaan pada *Mediaindonesia.com* cenderung berada di sisi pemerintah pusat sebagai pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahan pulau ini. Berita yang ditulis oleh *Mediaindonesia.com* lebih banyak menjelaskan langkah dan kebijakan konkret pemerintah pusat, khususnya melalui Mendagri, yang dinilai sebagai sumber utama dalam mencari solusi akhir atas polemik ini.

Walaupun sejatinya polemik ini timbul akibat kebijakan pemerintah sendiri melalui SK Kepmendagri yang memicu reaksi publik, terutama dari masyarakat Aceh, *Mediaindonesia.com* tetap menonjolkan upaya penyelesaian dari pemerintah. Hal ini tampak dari beberapa informasi berita yang bersumber dari Wamendagri Bima Arya yang menjelaskan bahwa Mendagri akan berdiskusi dengan berbagai pihak, Menko Yusril yang meminta publik untuk bersabar dalam penyelesaian masalah ini, serta Ketua Komisi II DPR RI yang mengapresiasi langkah strategis pemerintah. Hingga akhirnya, muncul tindakan Presiden Prabowo yang mengeluarkan keputusan bahwa pulau yang disengketakan kembali menjadi milik Provinsi Aceh. Dapat dinilai bahwa langkah kebijakan Presiden

Prabowo merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan polemik sengketa empat pulau Aceh ini.

5. Daftar Pustaka

- Azani, M., Hadiprashada, D., & Perdana, D. D. (2023). Analisis framing tentang pemberitaan pemindahan ibu kota negara pada media online *Republika.co.id* dan *Kompas.com*. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 4(3), 1432–1445. <https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.349>.
- Bahagia, M. (2025). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Studi Kasus Pada Pengaruh Pemberitaan Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Umum. *Grondwet*, 4(1), 50-64.
- Dahlia, R. R., & Permana, P. A. (2022). Oligarki media dalam pusaran pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019 menuju 2024. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.65-81>.
- Eriyanto. (2018). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Hasan, A. I., Muhtadi, A. S., & Fakhruroji, F. (2022). Konstruksi Media Pada Pemberitaan Pemblokiran Media Islam. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 7(4), 377-396.
- Kurniansyah, R. A., Mulyana, D., Siregar, R. K., & Harningsih, H. (2024). Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di Tempo. co Edisi 5-7 Januari 2024). *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 8(1), 39-50.
- Mawaaddah. (2025). Analisis opini publik tagar #JanganJadiDosen pada media sosial X (Twitter). *Jurnal Ikraith Humaniora*, 9(2), 408–416. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>.

- Nabila, M. K., & An'amta, D. A. A. (2024). Konflik Rempang dalam bingkai media (Analisis framing media online Batamtimes.co dan Batamnews.co). *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(4), 338–350. <https://doi.org/10.20527/hjs.v3i4.345>.
- Paradita, E., Ritonga, M. H., & Matondang, M. A. (2024). Penggunaan podcast redaksi sinier LPM Dinamika sebagai media informasi akademik mahasiswa. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1658–1666. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.729>.
- Pratiwi, E. N., Utama, M. C., Pratama, S. S., Syair, A. M. A., & Widhiandono, D. (2025). Analisis framing berita pertemuan Donald Trump dan Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih dalam pemberitaan Detik.com dan CNN Indonesia. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 5(2), 38–57. <https://doi.org/10.69957/relasi.v5i02.2070>.
- Putri, A. R., Yuwarti, H., & Prihatiningsih, N. (2023). Implementasi kegiatan CSR Metro TV dalam mempertahankan reputasi. *Jurnal Cyber PR*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v23i1.3185>
- Siagian, P., & Ritonga, M. U. (2024). Analisis framing dalam pemberitaan politik di tvonenews.com. *Jurnal Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 126–139. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.96>.
- Tabroni, R., Muhtadi, A. S., & Mukarom, Z. (2023). Komodifikasi filantropi keagamaan di Harian Umum Republika. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.25081>.
- Triamanda, I., Ningrum, T. W., & Nalendra, B. A. (2023). Analisis framing pemberitaan pemindahan ibu kota negara baru pada media online CNN Indonesia. *Jurnal Audiens*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.2>.
- Wibowo, A. Y., & Triyono, A. (2024). Analisis framing pemberitaan relokasi Pulau Rempang pada media online Kompas.com dan Detik.com. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(2), 1422–1431. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.689>.
- Wijoyo, A. E., Rahayu, N. S., & Hamka. (2024). Strategi penyelesaian sengketa pulau antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. *Journal Publicuho*, 7(2), 982–1001. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.452>.